1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan di Kabupaten Luwu Timur untuk Triwulan III Tahun 2026 perlu terus mendapat perhatian dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting), barang lainnya, serta jasa dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan distribusi, perubahan permintaan masyarakat, faktor musiman, perkembangan harga komoditas pangan, serta kondisi cuaca dan kelancaran transportasi.

Pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui pemantauan perkembangan harga secara berkala, koordinasi antara Pemerintah Daerah, TPID, pelaku usaha, distributor, serta instansi terkait, dan pelaksanaan langkah-langkah stabilisasi pasokan dan harga.

Beberapa komoditas pangan yang menjadi perhatian dalam pemantauan harga antara lain **beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir dan komoditas pangan strategis lainnya**. Selain kelompok pangan, perkembangan harga **BBM, LPG, tarif angkutan, serta jasa** juga perlu dipantau karena dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap biaya distribusi dan harga barang di tingkat konsumen.

Perkembangan Harga dan Faktor yang Memengaruhi

Kelompok	Komoditas/Komponen	Perkembangan yang Perlu Dipantau	Faktor Risiko
Pangan	Beras	Ketersediaan stok dan harga di tingkat konsumen	Produksi, musim panen, distribusi
Pangan	Cabai merah/cabai rawit	Fluktuasi harga relatif tinggi	Cuaca, produksi, pasokan antardaerah
Pangan	Bawang merah/putih	Perubahan harga mengikuti pasokan	Distribusi dan pasokan dari sentra produksi
Pangan	Telur ayam ras	Sensitif terhadap harga pakan dan pasokan	Harga pakan, produksi, distribusi
Pangan	Daging ayam ras	Dipengaruhi produksi dan permintaan	Pakan, DOC, permintaan masyarakat

Kelompok	Komoditas/Komponen	Perkembangan yang Perlu Dipantau	Faktor Risiko
Pangan	Gula/minyak goreng	Perlu pemantauan stok dan harga	Harga komoditas dan distribusi
Energi	BBM dan LPG	Berdampak terhadap biaya distribusi	Kebijakan harga dan ketersediaan
Transportasi	Angkutan	Mempengaruhi biaya distribusi barang	Harga BBM, jarak dan kondisi jalan
Jasa	Jasa transportasi dan jasa lainnya	Mengikuti permintaan dan biaya operasional	Mobilitas dan biaya input

Risiko Inflasi ke Depan

Memasuki **Triwulan IV Tahun 2026**, terdapat beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian TPID Kabupaten Luwu Timur, antara lain:

1. **Risiko kenaikan harga komoditas pangan** akibat gangguan produksi, perubahan cuaca, dan keterbatasan pasokan dari daerah sentra produksi.
2. **Risiko gangguan distribusi** yang dapat meningkatkan biaya logistik dan menyebabkan disparitas harga antarwilayah.
3. **Risiko kenaikan harga cabai dan komoditas hortikultura** akibat faktor musiman dan kondisi cuaca.
4. **Risiko peningkatan permintaan masyarakat** menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional dan akhir tahun yang dapat mendorong kenaikan harga beberapa komoditas.
5. **Risiko kenaikan biaya transportasi dan distribusi**, terutama apabila terjadi perubahan harga BBM atau peningkatan biaya operasional.
6. **Risiko pasokan pangan tertentu dari luar daerah**, mengingat sebagian kebutuhan masyarakat Kabupaten Luwu Timur masih dipenuhi melalui pasokan antardaerah.
7. **Risiko kenaikan harga jasa** yang dapat terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi pada akhir tahun.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan III Tahun 2026 Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga, kondisi pasokan, distribusi barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting), serta perkembangan inflasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Luwu Timur.

No.	Permasalahan	Faktor Penyebab	Dampak terhadap Inflasi

1	**Fluktuasi harga pangan strategis**	Perubahan produksi dan pasokan komoditas, khususnya beras, cabai, bawang, telur dan daging ayam ras	Mendorong kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi kelompok makanan
2	**Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah**	Sebagian kebutuhan pangan dan komoditas tertentu masih dipenuhi dari daerah lain	Apabila terjadi gangguan pasokan, harga di tingkat konsumen dapat meningkat
3	**Ketidakstabilan produksi komoditas pangan**	Faktor cuaca, musim panen, produktivitas dan ketersediaan sarana produksi	Menyebabkan pasokan tidak selalu tersedia secara berkesinambungan
4	**Biaya distribusi dan transportasi**	Jarak antara sentra produksi, pasar dan wilayah konsumen serta biaya angkutan	Meningkatkan harga jual komoditas di tingkat konsumen
5	**Disparitas harga antarwilayah**	Perbedaan biaya distribusi, ketersediaan stok dan akses terhadap pasar	Menimbulkan perbedaan harga komoditas antarwilayah dalam Kabupaten Luwu Timur
6	**Risiko gangguan pasokan akibat kondisi cuaca**	Curah hujan, perubahan musim dan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi produksi maupun distribusi	Berpotensi mengurangi pasokan dan meningkatkan harga komoditas pangan
7	**Keterbatasan stok pada komoditas tertentu**	Belum seluruh komoditas memiliki cadangan/persediaan yang memadai untuk menghadapi gangguan pasokan	Harga lebih mudah mengalami kenaikan ketika permintaan meningkat
8	**Pemantauan harga dan pasokan perlu diperkuat**	Data harga, stok dan distribusi perlu diperbarui secara berkala dan terintegrasi	Respons terhadap gejolak harga dapat menjadi kurang cepat apabila informasi tidak tersedia tepat waktu
9	**Respons terhadap kenaikan harga perlu dipercepat**	Diperlukan mekanisme deteksi dini dan langkah intervensi yang lebih cepat	Kenaikan harga berpotensi berlangsung lebih lama
10	**Koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat**	Pengendalian inflasi melibatkan sektor pertanian, perdagangan, pangan, perhubungan dan sektor lainnya	Kebijakan pengendalian inflasi dapat kurang optimal apabila intervensi tidak dilakukan secara terpadu
11	**Risiko peningkatan permintaan pada periode tertentu**	Hari besar keagamaan, kegiatan masyarakat dan periode tertentu dapat meningkatkan permintaan	Berpotensi menyebabkan kenaikan harga apabila tidak diimbangi ketersediaan pasokan
12	**Keterjangkauan harga bagi masyarakat**	Kenaikan harga beberapa komoditas dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga	Berpotensi menurunkan daya beli masyarakat apabila kenaikan berlangsung secara berkelanjutan

Permasalahan Utama yang Perlu Mendapat Perhatian

Dari berbagai permasalahan tersebut, terdapat beberapa isu utama yang perlu menjadi perhatian TPID Kabupaten Luwu Timur pada akhir Triwulan III dan memasuki Triwulan IV Tahun 2026, yaitu:

1. **Fluktuasi harga komoditas pangan strategis**, terutama komoditas yang memiliki kontribusi terhadap perubahan harga pangan dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
2. **Keberlanjutan ketersediaan pasokan**, khususnya untuk komoditas yang sebagian kebutuhannya masih dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah.
3. **Kelancaran distribusi dan biaya transportasi**, termasuk potensi gangguan distribusi akibat kondisi cuaca maupun kendala akses antarwilayah.
4. **Disparitas harga antarwilayah**, yang perlu dikendalikan melalui pemantauan harga secara berkala dan penguatan konektivitas distribusi.
5. **Kesiapan menghadapi periode peningkatan permintaan**, termasuk pengamanan stok dan kelancaran distribusi menjelang periode hari besar keagamaan dan momen tertentu yang berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat.
6. **Penguatan sistem informasi harga dan pasokan**, sehingga TPID dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat sebagai dasar penetapan langkah intervensi.

Penguatan koordinasi TPID dan OPD terkait, terutama dalam pelaksanaan langkah 4K, yaitu **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif**.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan dikabupaten Luwu Timur Pada Triwulan III Tahun 2026 Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan berbagai langkah pengendalian inflasi secara terpadu dengan mengacu pada strategi **4K**, yaitu **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif**.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 diarahkan pada pemantauan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyediaan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

1. Keterjangkauan Harga

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama TPID melakukan pemantauan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara berkala pada pasar dan lokasi perdagangan di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan

harga secara signifikan dan mengantisipasi dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Langkah yang dilakukan antara lain:

- pemantauan harga komoditas pangan strategis;
- identifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga;
- koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor;
- fasilitasi langkah stabilisasi harga apabila terjadi gejolak harga;
- penyampaian informasi perkembangan harga kepada masyarakat.

Komoditas yang menjadi perhatian antara lain **beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir dan komoditas pangan strategis lainnya**.

2. Ketersediaan Pasokan

Dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan pangan masyarakat, TPID melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pelaku usaha, distributor, serta pihak lainnya dalam memantau kondisi stok dan kelancaran pasokan.

Kebijakan diarahkan untuk menjaga kesinambungan pasokan dari sentra produksi maupun daerah pemasok ke wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Langkah yang dilakukan meliputi:

- pemantauan ketersediaan stok komoditas pangan strategis;
- koordinasi dengan produsen, distributor dan pedagang;
- penguatan produksi pangan lokal;
- pemanfaatan potensi produksi daerah;
- identifikasi kebutuhan pasokan dari luar daerah;
- antisipasi kekurangan pasokan pada komoditas tertentu.

Upaya tersebut penting untuk mengurangi risiko kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan dan menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dengan kebutuhan masyarakat.

3. Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama TPID melakukan pemantauan terhadap jalur distribusi barang kebutuhan pokok dan penting, termasuk potensi hambatan distribusi akibat kondisi cuaca, jarak wilayah, biaya transportasi dan kondisi infrastruktur.

Langkah yang dilakukan meliputi:

- pemantauan kelancaran distribusi komoditas pangan;
- koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha;
- identifikasi hambatan distribusi;
- fasilitasi distribusi komoditas dari daerah pemasok;
- pemantauan disparitas harga antarwilayah;
- penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait transportasi dan perdagangan.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan barang kebutuhan masyarakat dapat tersedia di pasar dengan harga yang wajar.

4. Komunikasi Efektif

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi, TPID Kabupaten Luwu Timur terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah serta dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi, pemantauan perkembangan harga dan pasokan, penyampaian informasi kepada masyarakat serta koordinasi apabila terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga.

Komunikasi efektif juga diarahkan untuk mencegah berkembangnya informasi yang dapat mendorong panic buying dan meningkatkan ekspektasi inflasi masyarakat.

5. Penguatan Koordinasi TPID

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi dilakukan secara lintas sektor karena stabilitas harga dipengaruhi oleh berbagai aspek, mulai dari produksi, perdagangan, distribusi, transportasi hingga konsumsi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, TPID Kabupaten Luwu Timur melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, antara lain sektor **perekonomian, perdagangan, pertanian, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, serta perangkat daerah dan instansi terkait lainnya**.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap perkembangan harga dan pasokan dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

6. Pemantauan dan Deteksi Dini Perkembangan Harga

Sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, dilakukan pemantauan perkembangan harga komoditas secara berkala untuk memperoleh informasi mengenai kecenderungan kenaikan maupun penurunan harga.

Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan:

1. identifikasi komoditas penyumbang tekanan harga;
2. identifikasi potensi kekurangan pasokan;
3. penyusunan langkah intervensi;
4. koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha;
5. penyusunan rekomendasi kebijakan TPID.

Dengan adanya pemantauan secara berkala, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan langkah antisipasi sebelum gejolak harga berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih besar.

7. Arah Kebijakan Memasuki Triwulan IV Tahun 2026

Memasuki Triwulan IV Tahun 2026, kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Luwu Timur

perlu diarahkan pada penguatan pengamanan pasokan dan stabilisasi harga, dengan fokus pada:

No.	Fokus Kebijakan	Langkah yang Perlu Dilakukan
1	Keterjangkauan harga	Pemantauan harga komoditas strategis dan intervensi apabila terjadi gejolak
2	Ketersediaan pasokan	Pengamanan stok dan koordinasi dengan daerah pemasok
3	Kelancaran distribusi	Pemantauan jalur distribusi dan biaya transportasi
4	Produksi pangan	Penguatan produksi komoditas pangan lokal
5	Data dan informasi	Penguatan data harga, stok dan kebutuhan komoditas
6	Komunikasi	Penyampaian informasi harga dan ketersediaan pangan kepada masyarakat
7	Koordinasi	Penguatan koordinasi TPID dan OPD terkait
8	Antisipasi HBKN	Penyiapan stok dan langkah stabilisasi menghadapi peningkatan permintaan

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan III Tahun 2026 dilakukan untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi serta meningkatkan efektivitas komunikasi kepada masyarakat.

Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, kondisi pasokan dan distribusi, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta respons Pemerintah Daerah terhadap potensi gejolak harga.

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi telah dilaksanakan melalui pendekatan **4K**, yaitu **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif**. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam hal deteksi dini, pengamanan pasokan, integrasi data serta kecepatan respons terhadap perubahan harga.

B. Evaluasi Berdasarkan Strategi 4K

No.	Aspek	Evaluasi Pelaksanaan	Permasalahan/Kendala	Arah Perbaikan
1	**Keterjangkauan Harga**	Pemantauan harga Bapokting telah dilakukan sebagai dasar mengetahui perkembangan harga di daerah	Harga beberapa komoditas pangan masih berfluktuasi	Meningkatkan frekuensi pemantauan dan menyiapkan langkah intervensi lebih cepat
2	**Ketersediaan Pasokan**	Koordinasi dengan OPD, produsen, distributor dan pelaku usaha dilakukan untuk menjaga ketersediaan komoditas	Sebagian kebutuhan komoditas masih bergantung pada pasokan dari luar daerah	Memperkuat produksi pangan lokal dan kerja sama dengan daerah pemasok

3	**Kelancaran Distribusi**	Pemantauan distribusi dan koordinasi dengan pelaku usaha dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan	Biaya transportasi dan kondisi geografis dapat memengaruhi harga	Memperkuat efisiensi distribusi dan koordinasi antardaerah
4	**Komunikasi Efektif**	Koordinasi TPID dan penyampaian informasi perkembangan harga dilakukan secara berkala	Integrasi dan kecepatan penyampaian data masih perlu diperkuat	Membangun mekanisme informasi harga dan pasokan yang lebih cepat dan terintegrasi

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Luwu Timur Pada Triwulan III Tahun 2026 Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga, kondisi pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting), identifikasi permasalahan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, diperlukan langkah kebijakan yang lebih terarah, terukur dan responsif dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi diarahkan pada penguatan **4K**, yaitu **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif**, dengan rekomendasi sebagai berikut.

1. Memperkuat Pemantauan dan Deteksi Dini Harga

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui TPID perlu meningkatkan pemantauan harga Bapokting secara berkala pada pasar-pasar utama dan wilayah yang memiliki potensi gejolak harga.

Pemantauan perlu diarahkan terutama terhadap komoditas pangan strategis seperti **beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng dan gula pasir**.

Tindak lanjut:

- melakukan pemantauan harga secara berkala;
- mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan signifikan;
- menyusun informasi perkembangan harga sebagai bahan rapat TPID;
- menetapkan mekanisme peringatan dini terhadap komoditas berisiko.

2. Menjamin Ketersediaan dan Kesinambungan Pasokan

Untuk mengurangi risiko kenaikan harga akibat kekurangan pasokan, perlu dilakukan penguatan koordinasi antara OPD, produsen, distributor dan daerah pemasok.

Kebijakan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta penguatan ketahanan pangan daerah.

Tindak lanjut:

- memetakan kebutuhan dan ketersediaan komoditas strategis;
- mengidentifikasi daerah pemasok;
- memperkuat kerja sama pasokan antardaerah;
- mendorong peningkatan produksi pangan lokal;
- melakukan pengamanan stok sebelum periode permintaan tinggi.

3. Meningkatkan Produksi Komoditas Pangan Lokal

Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu mendorong peningkatan produksi komoditas pangan yang berpotensi memengaruhi inflasi.

Tindak lanjut:

- penguatan produksi komoditas pangan strategis;
- pemanfaatan lahan dan potensi produksi daerah;
- dukungan sarana dan prasarana produksi;
- penguatan kelompok tani dan pelaku usaha pangan;
- pengembangan kerja sama antara produsen dan pasar.

4. Memperkuat Kelancaran Distribusi

Biaya transportasi dan jarak distribusi dapat memengaruhi harga barang di tingkat konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap hambatan distribusi dan komponen biaya yang berpotensi meningkatkan harga.

Tindak lanjut:

- pemantauan jalur distribusi Bapokting;
- identifikasi wilayah yang mengalami keterlambatan atau kekurangan pasokan;
- koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha;
- fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan;
- pemantauan disparitas harga antarwilayah.

5. Menyiapkan Intervensi Pasar Secara Terukur

Apabila terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga secara signifikan dan berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, TPID perlu menyiapkan langkah intervensi sesuai kondisi dan kewenangan pemerintah daerah.

Intervensi dapat dilakukan melalui **Gerakan Pangan Murah, operasi pasar/pasar murah, fasilitasi distribusi pangan, maupun bentuk intervensi lainnya** sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

6. Memperkuat Kerja Sama Antardaerah

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil atau daerah pemasok komoditas pangan strategis.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memastikan tersedianya pasokan pada saat terjadi kekurangan produksi lokal maupun peningkatan permintaan masyarakat.

7. Meningkatkan Integrasi Data Harga dan Pasokan

Data yang cepat, akurat dan terintegrasi diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi.

Tindak lanjut:

- mengintegrasikan data harga, stok, produksi dan kebutuhan;
- melakukan pembaruan data secara berkala;
- memperkuat koordinasi antara OPD penghasil data;
- menggunakan data sebagai dasar penentuan komoditas prioritas intervensi.

8. Memperkuat Koordinasi TPID

Koordinasi TPID perlu dilakukan secara berkala dengan membahas perkembangan harga, stok, produksi dan distribusi serta menetapkan langkah tindak lanjut terhadap komoditas yang mengalami tekanan harga.

Koordinasi tidak hanya dilakukan pada saat terjadi kenaikan harga, tetapi juga sebagai langkah **antisipatif dan preventif**.

9. Meningkatkan Komunikasi kepada Masyarakat

Komunikasi publik perlu diperkuat untuk memberikan informasi mengenai kondisi harga, ketersediaan pangan dan langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

Informasi yang disampaikan secara tepat dan berkala diharapkan dapat menjaga ekspektasi masyarakat serta mencegah perilaku pembelian berlebihan (*panic buying*).

10. Antisipasi Pengendalian Inflasi Triwulan IV Tahun 2026

Memasuki Triwulan IV Tahun 2026, TPID Kabupaten Luwu Timur perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi peningkatan permintaan masyarakat dan gangguan pasokan maupun distribusi.

Fokus kebijakan diarahkan pada:

No.	Prioritas	Rekomendasi Tindakan
1	**Harga**	Pemantauan harga Bapokting secara lebih intensif
2	**Pasokan**	Pengamanan stok dan kerja sama dengan daerah pemasok
3	**Produksi**	Peningkatan produksi komoditas pangan lokal
4	**Distribusi**	Menjaga kelancaran distribusi dan mengantisipasi hambatan transportasi
5	**Intervensi**	Menyiapkan pasar murah/Gerakan Pangan Murah apabila diperlukan
6	**Data**	Penguatan data harga, stok, produksi dan kebutuhan
7	**Koordinasi**	Penguatan koordinasi TPID dan OPD terkait

8 **Komunikasi** Penyampaian informasi harga dan ketersediaan pangan kepada masyarakat

11. Matriks Rekomendasi Kebijakan dan Penanggung Jawab

No.	Rekomendasi	OPD/Instansi Terkait	Output yang Diharapkan
1	Pemantauan harga Bapokting	Bagian Perekonomian, Dinas Perdagangan	Data perkembangan harga
2	Pengamanan pasokan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, distributor	Ketersediaan komoditas
3	Peningkatan produksi pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan	Peningkatan produksi lokal
4	Kelancaran distribusi	Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan	Distribusi lebih lancar
5	Pasar murah/Gerakan Pangan Murah	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, TPID	Stabilitas harga dan keterjangkauan
6	Kerja sama pasokan	TPID/Pemkab, distributor, daerah pemasok	Kepastian pasokan
7	Integrasi data	Bagian Perekonomian, BPS, OPD terkait	Data harga dan pasokan yang lebih cepat
8	Komunikasi publik	Bagian Perekonomian, Diskominfo, OPD terkait	Informasi harga yang akurat
9	Evaluasi kebijakan	TPID Kabupaten Luwu Timur	Rekomendasi kebijakan lanjutan

12. Prioritas Utama

Berdasarkan kondisi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat **lima prioritas utama** yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur:

1. **Menjaga stabilitas harga pangan strategis** melalui pemantauan dan deteksi dini.
2. **Menjamin ketersediaan pasokan** melalui penguatan produksi lokal dan kerja sama antardaerah.
3. **Menjamin kelancaran distribusi** dan mengendalikan faktor biaya yang dapat meningkatkan harga.
4. **Menyiapkan intervensi harga secara cepat dan terukur** apabila terjadi gejolak harga.
5. **Memperkuat sistem data dan koordinasi TPID** sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.